



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

RENCANA KERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR ISI

Halaman Judul .	i	
Daftar Isi	ii	
Kata Pengantar	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2	Analisis Kinerja Perangkat Daerah	15
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3	Program dan Kegiatan	30
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V	PENUTUP	43

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ini disusun untuk memberikan arah dan sebagai pedoman bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan perizinan pada masyarakat dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kami Rencana Kerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 10 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo



drh. SAPTO DJATMIKO, T.R., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670130 199202 1 002

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi Kepala Daerah dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016– 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Rensta Perangkat Daerah Tahun 2021 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Rancangan awal yang sedang proses penyusunan dan pengesahan
2. Penyusunan indicator dalam Rencana Kerja tahun 2021 berpedoman kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tat acara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, , dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tabel Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama;
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Ponorogo Nomor 188.4/ 112 /405.16/2020 tentang Review Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perkiraan tingkat capaian target indikator program dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019 secara singkat sebagai berikut :

1. Tingkat capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%
2. Tingkat Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%
3. Tingkat capaian Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%
4. Tingkat capaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 100%
5. Tingkat capaian Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 100%
6. Tingkat capaian Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu sebesar 100%
7. Tingkat capaian Program Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Perijinan sebesar 100%

Gambaran lengkap capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel TC-29
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2019
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah

: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pelayanan Bukan Dasar										
	Bidang Penanaman Modal										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1400 eksemplar	1645 eksemplar						
	Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	1400 eksemplar	2292 eksemplar	1400 eksemplar	2292 eksemplar	176%			
			Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang dibayar	24 tagihan	24 tagihan	24 tagihan	24 Tagihan	100%			
	Penyediaan jasa surat menyurat, atk, barang cetakan dan penggandaan		Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	6000 eksemplar					2000 eksemplar	2991 eksemplar	149,55%
			Jumlah ATK, cetak dan penggandaan yang tersedia	6 paket					2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang dibayar	48 tagihan	24 tagihan	24 tagihan	24 tagihan	100%	24 tagihan	24 tagihan	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	50 unit	50 unit						
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	300 unit	200 unit	100 unit	100 unit	100%	100 unit	100 unit	100%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	15 orang	15 orang						
	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan		Jumlah penerima jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	75 orang	45 orang	15 orang	15 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah peralatan kebersihan bahan pembersih yang tersedia dan	6 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
			Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%
	Penyediaan ATK		Penyediaan ATK	1 paket	1 paket						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket						
	Penyediaan ATK, barang cetakan dan penggandaan		Jumlah ATK, cetak dan penggandaan yang tersedia	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Lampu, kabel, alat-alat listrik yang tersedia	100 unit	70 unit	30 unit	30 unit	100%	30 unit	30 unit	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	23 unit	23 unit						

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga		Jumlah peralatan yang tersedia	35 unit	35 unit	34 unit	34 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah koran yang tersedia	120 eksemplar	72 eksemplar	24 eksemplar	24 eksemplar	100%	24 eksemplar	24 eksemplar	100%
	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah aparatur penerima makanan dan minuman harian	32500 bungkus	11520 bungkus	6500 bungkus	6500 bungkus	100%	6500 bungkus	6500 bungkus	100%
	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke ;uar daerah		Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 org/kali	150 kali/org	50 kali/org	50 kali/org	100%	100 kali/org	100 kali/org	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dibeli	1 unit	1 unit						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	12 unit						
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	1 unit						
	Pengadaan mebelair gedung kantor, rumah jabatan/dinas dan sarana prasarana kerja aparatur		Jumlah mebelair gedung yang dibeli	16 unit	4 unit				12 unit	12 unit	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas dan opsional yang dipelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	12 unit	100%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		prosentase peningkatan disiplin	100%	100%						
	Pengadaan khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian hari hari tertentu	36 stel	36 stel						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%	100%						
	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah aparat yang mengikuti diklat/pelatihan	10 org	10 org						
	Program Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase peningkatan Sumber daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%			
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu/pakaian tradisional/pakaian adat		Jumlah pakaian khusus/pakaian tradisional yang tersedia	36 stel	36 stel	36 stel	36 stel	100%			
	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah aparatur yang mengikuti bintek, workshop	3 orang	3 orang	3 orang	5 orang	166%			
	Program Peningkatan Disiplin dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%					100%	100%	100%
	Pendidikan dan pelatihan formal		jumlah aparatur yang menerima pelatihan atau pendidikan	3 org					3 org	3 org	100%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja (DPA, DPPA, LKj, LPPD, laporan realisasi	35 dokumen	14 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah dokumen lap keuangan semester	2 dok	2 dok						100%
	Penyusunan pelaporan akhir tahun		Jumlak dokumen lap keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok						100%
	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	10 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah promosi dan sosialisasi kerjasama untuk pelaku usaha	3 fasilitasi	3 fasilitasi						
			Jumlah fasilitasi kerjasama	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100%			
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal		Jumlah dokumen perencanaan	4 dok	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%			
	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Pameran investasi	1 pameran	1 pameran						
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah		Jumlah promosi dan atau peninjauan kerjasama di bidang usaha	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100%			
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Jumlah jenis dokumen investasi	3 dokumen					1 dok	1 dok	33%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Jumlah fasilitasi investasi	3					1 jenis	1 jenis	33%
			Jumlah promosi investasi	3					1	1	33%
			Prosentase kerjasama investasi yang ditindaklanjuti	100%					100%	100%	100%
			Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Jumlah kerjasama investasi yang dilakukan	3				1	1	33%
			Jumlah promosi dan atau gathering investasi yang diselenggarakan (East Java In Festival/Pameran Investasi di Jatim dll)	3					1	1	33%
			Jumlah sarana promosi (videografis dll)	3					1	1	33%
			Konsolidasi, perencanaan dan pengembangan penanaman modal daerah (KP3MD)	sinkronisasi data pendukung potensi investasi dengan SKPD teknis	11 kali				3	3	27%
			Jumlah Dokumen sinkronisasi data investasi yang tersedia	36 dok					12	12	33%
			Jumlah dokumen potensi peluang investasi	3 dokumen					1	1	33%
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase penerbitan ijin tepat waktu	100%	100%					

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah		Jumlah permohonan yang diverifikasi	1800 permohonan	4233 permohonan						
	Program Pelayanan Perijinan dan Non perijinan Secara Terpadu Satu Pintu		Prosentase penerbitan ijin tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%					100%	100%	100%
	Peningkatan pelayanan publik bidang perijinan		Jumlah izin yg diterbitkan tepat waktu	1800	4233	1800	4233 permohonan	235%			
			Jumlah permohonan izin yg diverifikasi	50 orang	0	0	0	0%	50 orang	50 orang	100%
			% pendampingan yang berhasil	100%					100%	100%	100%
			% permohonan izin yg berkasnya sesuai dengan ketentuan	100%					100%	100%	100%
			Jumlah koordinasi dg SKPD teknis	108					36 kali	36 kali	33%
	Koordinasi pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (APPK)		Jumlah ijin yang diterbitkan	1800 izin	4233 izin	1800	4233 ijin	235%			
			Prosentase rekomendasi SKPD Teknis yang tidak melebihi batas waktu	100%					100%	100%	100%
			Prosentase izin terbit sesuai SOP	100%					100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang lengkap dan valid	100%					100%	100%	100%
			Sosialisasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perijinan	Jumlah dokumen laporan pengawasan penerbitan perizinan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait penerbitan izin	3 dokumen	3 dok	3 dokumen	3 dokumen	100%		
			Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian penerbitan perijina dan non perijinan	Jumlah peserta koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian perizinan	30 SKPD				10 SKPD	10 SKPD	100%
				Prosentase pengaduan masy. yang ditindaklanjuti	100%				100%	100%	100%

Ponorogo, 10 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Relayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo



drh. SAPTO DJATMIKO, T.R., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670130 199202 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016 - 2021 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Capaian kinerja pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan tahun 2019 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo tahun 2016 - 2021. Pencapaian Kinerja selengkapnya dijabarkan ke dalam Tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	IKM	-	-	77,5	77,8	85	85,5	86	83,31	82,64	85	85,5	86	Tercapai
2	Nilai investasi	-	-	170 milyar	175, 1 milyar	360 milyar	680 milyar	1,2 trilyun	296.225.492.446	645.520.641.239	1.284.897.499.577	680 milyar	1,2 trilyun	Terlampau

Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo melaksanakannya dalam program dan kegiatan sbb:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan/non perizinan
 - 1. Program : Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu Satu Pintu
 - Kegiatan :
 - 1. Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perijinan
 - 2. Koordinasi, pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi (AAPK)
 - 3. Sosialisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perijinan
 - 2. Program : Program Peningkatan Akuntabilitas di Bidang Perijinan
 - Kegiatan :
 - 1. Penyusunan database perijinan dan non perijinan
 - 2. Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pengendalian penerbitan perijinan dan non perijinan
- 2. Meningkatnya Nilai investasi daerah
 - 1. Program : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - Kegiatan :
 - 1. Konsolidasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal daerah
 - 2. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, Pembangunan secara langsung telah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memajukan kesejahteraan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui fungsinya telah berusaha untuk ikut andil dalam peningkatan pembangunan daerah tetapi dalam pelaksanaannya menjumpai beberapa kendala diantaranya :

- a. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Aparatur
- Pelayanan perizinan dan investasi yang maju dan inovatif dihadapkan pada permasalahan keterbatasan kompetensi Sumber Daya Aparatur. Jumlah karyawan/karyawati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini dirasa masih kurang, apalagi jika kita melihat lebih jauh ke dalam apakah sumber daya aparatur yang ada sudah memadai secara profesionalitas dan kompetensi ternyata masih kurang.
- Selain dari segi jumlah penempatan “the right man on the right place” juga harus dilaksanakan, agar tercipta profesionalitas dalam memberikan pelayanan. Penempatan

- karyawan/karyawati yang kompeten sesuai dengan bidang profesionalitasnya agar membantu terwujudnya pelayanan perizinan/non perizinan yang berkualitas pula.
- b. Masih kurangnya regulasi-regulasi daerah di bidang penanaman modal sehingga masih diperlukan adanya penyusunan regulasi tentang penanaman modal dan investasi dengan menimbang faktor kemajuan zaman sehingga investor memiliki acuan yang jelas akan investasinya yang mana secara otomatis akan meningkatkan investasi
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana
- Pada masa saat ini telah banyak bermunculan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan di berbagai sektor. Sistem komputerisasi telah memberikan andil dalam kemajuan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat tidak terkecuali pelayanan perizinan dan investasi. Kemajuan teknologi mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dirasa akan lebih mudah, murah, dan cepat. Dalam mewujudkan pengembangan teknologi di bidang pelayanan perizinan/non perizinan dan investasi di butuhkan sarana dan prasarana yang menunjang di antaranya sebagai contoh jaringan, komputer server dan lain sebagainya. Keterbatasan sarana prasarana tersebut menjadikan pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis teknologi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, padahal kemudahan yang didapat akan mendorong masyarakat untuk lebih sadar dalam pengurusan izin usahanya yang akan berdampak memberikan peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan terhadap nilai investasi di Daerah sehingga perekonomian daerah yang tangguh dapat tercapai.
- d. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan perizinan dan non perizinan sehingga untuk menanganinya perlu adanya unit penanganan pengaduan yang komprehensif dengan dukungan keterlibatan SKPD teknis terkait dan data yang akurat
- e. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan. Permasalahan ini dapat diatasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan langsung di wilayah kecamatan atau melalui media lain seperti brosur, pamflet, website ataupun media lainnya.
- f. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi hal ini maka perlu peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan. Dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya bank arsip perizinan dan non perizinan yang representatif.
- g. Database perizinan/non perizinan dan investasi belum terintegrasi. Dalam mengatasi hal ini perlu dibangun jaringan database yang sudah terintegrasi antara pemilik kebutuhan data sehingga data dapat dengan mudah di akses.
- h. Belum optimalnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Ponorogo sehingga penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu belum bisa optimal. Dalam hal ini maka perlu dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Dan juga perlu dibentuk pelayanan yang terintegrasi di mana Tim teknis berada di bawah satu atap hingga mempermudah objek pelayanan.

- i. Infrastruktur Kabupaten Ponorogo yang belum memadai mengakibatkan masyarakat dari daerah yang agak jauh dari kota malas untuk mengurus perizinan usahanya

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagai instansi yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di tingkat Kabupaten Ponorogo sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam lima tahun mendatang
2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim usaha yang menjadei salah satu prioritas dalam RPJMD 2016-2021, setiap lembaga dan Pemerintah Daerah seharusnya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan Daerah.
3. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan,

koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo di antaranya berkewajiban membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah sistem PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah.

4. Kondisi potensi dan peluang investasi di kabupaten Ponorogo sangat strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMDN ke depan. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan
5. Kemiskinan dan pengangguran. Adanya Laju Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, tingkat pendidikan yang rendah, besarnya Angkatan Kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang merupakan akumulasi penyebab terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Secara otomatis pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat perekonomian suatu daerah. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mendirikan industri-industri baru, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru, menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industriserta pelaksanaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, PLTU, PLTA dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerjasecara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual sebagai kekayaan baru organisasi dan mengantisipasi kompetenai global dengan membangun sikap kompetitif, bearti memabangun SDM handal, berwawasan laus sekaligus perhatian terhadap kemajuan. Kaitannya dengan upaya mengantisipasi kompetensi, tuntutan terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif dan mampu mendayagunakan modal intelektual tidak lepas dari

perubahan lingkungan khususnya Kabupaten Ponorogo, karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar cara hidup dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 didasarkan kepada Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021

dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2021 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dijabarkan dalam Tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel TC-31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP						Dinas Penanaman Modal Dan PTSP						
Rancangan Awal RKPD						Rancangan Awal RKPD						catatan penting
No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP		Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP		Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DPMPTSP		Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	4.991.200	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	4.991.200	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	DPMPTSP		Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja (DPA, DPPA, LKj, LPPD, laporan realisasi anggaran, Laporan Keuangan, laporan capaian kinerja)	5 dokumen	4.998.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja (DPA, DPPA, LKj, LPPD, laporan realisasi anggaran, Laporan Keuangan, laporan capaian kinerja)	5 dokumen	4.998.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP		Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP		Jumlah ASN penerima gaji	30 orang	2.501.562.000	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah ASN penerima gaji	30 orang	2.501.562.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP		Jumlah ASN yang menerima honor administrasi pelaksanaan tugas ASN	20 orang	70.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DPMPTSP	Jumlah ASN yang menerima honor administrasi pelaksanaan tugas ASN	20 orang	70.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP		Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMPTSP		Jumlah pakaian dinas yang dibeli	38 stel	38.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	38 stel	38.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPTSP		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	38 orang	65.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	DPMPTSP	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	38 orang	65.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP		Jumlah komponen listrik yang tersedia	10 unit	5.408.400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DPMPTSP	Jumlah komponen listrik yang tersedia	10 unit	5.408.400	
	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMPTSP		Jumlah Mamin yang tersedia	6500 bungkus	181.315.555	Penyediaan bahan logistik kantor	DPMPTSP	Jumlah Mamin yang tersedia	6500 bungkus	181.315.555	

	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					catatan penting	
No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
		DPMPTSP		Jumlah Bahan pembersih dan alat kebersihan yang tersedia	4 paket			DPMPTSP	Jumlah Bahan pembersih dan alat kebersihan yang tersedia	4 paket		
		DPMPTSP		Jumlah ATK tersedia	4 paket			DPMPTSP	Jumlah ATK tersedia	4 paket		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP		Jumkah barang cetak dan penggandaan	4 paket	17.138.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPTSP	Jumkah barang cetak dan penggandaan	4 paket	17.138.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP		Jumlah koran yang tersedia	240 eksemplar	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPTSP	Jumlah koran yang tersedia	240 eksemplar	3.600.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMPTSP		Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 orang/kali	91.888.600	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 orang/kali	91.888.600	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP		Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%		
	Pengadaan mebel	DPMPTSP		Jumlah mebel yang dibeli	2 unit	4.380.900	Pengadaan mebel	DPMPTSP	Jumlah mebel yang dibeli	2 unit	4.380.900	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	DPMPTSP		Jumlah sarana prasarana yang dibeli		124.042.400	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	DPMPTSP	Jumlah sarana prasarana yang dibeli		124.042.400	
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP		Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%		
	Penyediaan jasa surat menyurat	DPM PTSP		Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	450 lembar	12.998.000	Penyediaan jasa surat menyurat	DPM PTSP	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	450 lembar	12.998.000	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPM PTSP		Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang dibayar	24 tagihan	72.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	DPM PTSP	Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang dibayar	24 tagihan	72.000.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	30.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	30.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPM PTSP		Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia	6 orang	183.284.700	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DPM PTSP	Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia	6 orang	183.284.700	

	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					catatan penting	
No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP		Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPM PTSP	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%		
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPM PTSP		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	100.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	DPM PTSP	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	200.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	DPM PTSP		Jumlah sarana gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1.500.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	DPM PTSP	Jumlah sarana gedung kantor yang dipelihara	1 unit	1.500.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PONOROGO		Prosentase pengembangan iklim penanaman modal	100%		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PONOROGO	Prosentase pengembangan iklim penanaman modal	100%		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	PONOROGO		prosentase sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	100%		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	PONOROGO	prosentase sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	100%		
				Prosentase Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	100%				Prosentase Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	100%		
				Prosentase dokumen potensi peluang penanaman modal	100%				Prosentase dokumen potensi peluang penanaman modal	100%		

	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					catatan penting	
No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
				Prosentase Dokumen Perda Penanaman Modal	100%				Prosentase Dokumen Perda Penanaman Modal	100%		
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	PONOROGO		sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	3 dokumen	40.000.000	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	PONOROGO	sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	3 dokumen	40.000.000	
				Jumlah Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	12 dokumen				Jumlah Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	12 dokumen		
				Jumlah dokumen potensi peluang investasi	1 dokumen				Jumlah dokumen potensi peluang investasi	1 dokumen		
				Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal	1 dokumen				Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal	1 dokumen		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PONOROGO		Prosentase peningkatan promosi penanaman modal	100%		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PONOROGO	Prosentase peningkatan promosi penanaman modal	100%		
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PONOROGO		Prosentase sarana promosi penanaman modal yang tersedia	100%		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PONOROGO	Prosentase sarana promosi penanaman modal yang tersedia	100%		
				Prosentase promosi penanaman modal yang diikuti					Prosentase promosi penanaman modal yang diikuti			
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	PONOROGO		Jumlah sarana promosi penanaman modal yang tersedia	1 sarana	19.000.000	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	PONOROGO	Jumlah sarana promosi penanaman modal yang tersedia	1 sarana	19.000.000	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	REGIONAL DAN NASIONAL		Jumlah promosi penanaman modal yang diikuti	4 kali	41.000.000	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	REGIONAL DAN NASIONAL	Jumlah promosi penanaman modal yang diikuti	4 kali	41.000.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Prosentase peningkatan pelayanan penanaman modal	100%		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Prosentase peningkatan pelayanan penanaman modal	100%		

	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					catatan penting	
No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
	Pelayanan Perinaan dan Non Perizinan seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM PTSP		Prosentase Penerbitan Izin sesuai SOP	100%		Pelayanan Perinaan dan Non Perizinan seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPM PTSP	Prosentase Penerbitan Izin sesuai SOP	100%		
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP		Jumlah permohonan Izin yang diverifikasi	4000 berkas	25.860.000	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	DPM PTSP	Jumlah permohonan Izin yang diverifikasi	4000 berkas	25.860.000	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	DPM PTSP		Jumlah SKPD Teknis yang melaksanakan koordinasi	9 SKPD	19.937.800	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	DPM PTSP	Jumlah SKPD Teknis yang melaksanakan koordinasi	9 SKPD	19.937.800	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPM PTSP		Prosentase peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPM PTSP	Prosentase peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	100%		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	100%		
				Prosentase terselesaikannya pengaduan yang masuk	100%				Prosentase terselesaikannya pengaduan yang masuk	100%		
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanama modal	PONOROGO		Jumlah laporan pemantauan terhadap pelaku usaha	12 dokumen	500.000	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanama modal	PONOROGO	Jumlah laporan pemantauan terhadap pelaku usaha	12 dokumen	500.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanama modal	PONOROGO		Jumlah laporan pembinaan terhadap pelaku usaha	12 dokumen	30.539.400	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanama modal	PONOROGO	Jumlah laporan pembinaan terhadap pelaku usaha	12 dokumen	30.539.400	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanama modal	PONOROGO		Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaku Usaha	12 dokumen	372.462.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanama modal	PONOROGO	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaku Usaha	12 dokumen	372.462.000	
				Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 dokumen				Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 dokumen		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PONOROGO		Prosentase peningkatan pengelolaan data informasi penanaman odal	100%		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PONOROGO	Prosentase peningkatan pengelolaan data informasi penanaman odal	100%		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PONOROGO		Prosentase hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	100%		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PONOROGO	Prosentase hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	100%		
				Prosentase ketersediaan informasi secara manual (offline) maupun online	100%				Prosentase ketersediaan informasi secara manual (offline) maupun online	100%		

	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					catatan penting	
No.	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.000)
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	PONOROGO		Jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan	13 dokumen	20.010.600	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	PONOROGO	Jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan	13 dokumen	20.010.600	
				Jumlah dokumen rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	13 dokumen				Jumlah dokumen rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	13 dokumen		
				Jumlah dokumen pengelolaan/updating informasi secara manual (offline) maupun online	60 dokumen				Jumlah dokumen pengelolaan/updating informasi secara manual (offline) maupun online	60 dokumen		

2.5 Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel TC-32 berikut :

Tabel TC. 32
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
 Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	VOLUME	Catatan
1	3	3	4	5	6
	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja (DPA, DPPA, LKj, LPPD, laporan realisasi anggaran, Laporan Keuangan, laporan capaian kinerja)	5 dokumen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah ASN penerima gaji	30 orang	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah ASN yang menerima honor administrasi pelaksanaan tugas ASN	20 orang	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	38 stel	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	38 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah komponen listrik yang tersedia	10 unit	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Mamin yang tersedia	6500 bungkus	
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Bahan pembersih dan alat kebersihan yang tersedia	4 paket	
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah ATK tersedia	4 paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumkah barang cetak dan penggandaan	4 paket	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah koran yang tersedia	240 eksemplar	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50 orang/kali	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	VOLUME	Catatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%	
	Pengadaan mebel	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah mebel yang dibeli	2 unit	
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana prasarana yang dibeli		
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	100%	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	450 lembar	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang dibayar	24 tagihan	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	30 unit	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia	6 orang	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	100%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah sarana gedung kantor yang dipelihara	1 unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Prosentase pengembangan iklim penanaman modal	100%	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Ponorogo	prosentase sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	100%	
			Prosentase Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	100%	
			Prosentase dokumen potensi peluang penanaman modal	100%	
			Prosentase Dokumen Perda Penanaman Modal	100%	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Ponorogo	sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	3 dokumen	
			Jumlah Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	12 dokumen	
			Jumlah dokumen potensi peluang investasi	1 dokumen	
			Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal	1 dokumen	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase peningkatan promosi penanaman modal	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Prosentase sarana promosi penanaman modal yang tersedia	100%	
			Prosentase promosi penanaman modal yang diikuti		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	VOLUME	Catatan
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Ponorogo	Jumlah sarana promosi penanaman modal yang tersedia	1 sarana	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Regional dan Nasional	Jumlah promosi penanaman modal yang diikuti	4 kali	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Prosentase peningkatan pelayanan penanaman modal	100%	
	Pelayanan Perinaan dan Non Perizinan seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Prosentase Penerbitan Izin sesuai SOP	100%	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah permohonan Izin yang diverifikasi	4000 berkas	
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah SKPD Teknis yang melaksanakan koordinasi	9 SKPD	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	100%	
			Prosentase terselesaikannya pengaduan yang masuk	100%	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanama modal	Ponorogo	Jumlah laporan pemantauan terhadap pelaku usaha	12 dokumen	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanama modal	Ponorogo	Jumlah laporan pembinaan terhadap pelaku usaha	12 dokumen	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanama modal	Ponorogo	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaku Usaha	12 dokumen	
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	12 dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Prosentase peningkatan pengelolaan data informasi penanaman odal	100%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ponorogo	Prosentase hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	100%	
			Prosentase ketersediaan informasi secara manual (offline) maupun online	100%	
	Pengolahan, penyajian dan pemaataan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Ponorogo	Jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan	13 dokumen	
			Jumlah dokumen rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	13 dokumen	
			Jumlah dokumen pengelolaan/updating informasi secara manual (offline) maupun online	60 dokumen	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Bupati Kabupaten Ponorogo adalah *“Ponorogo yang Lebih maju, Berbudaya dan Religius”*. Misi Ke-1 Bupati Kabupaten Ponorogo adalah *“Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah”* sedangkan misi ke-2 adalah *“Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melaui investasi, industri, perdaganganan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. Strategi dan Arah Kebijakan yang mendukung diwujudkannya Visi dan Misi Bupati Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kualitas pelayanan peizinan/non perizinan	1. Percepatan dan kemudahan pelayanan	1. Pelaksanaan pelayanan berbasis IT 2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya nilai investasi	1. Meningkatkan kerjasama di bidang investasi antara pengusaha lokal dan pengusaha luar	1. Meningkatkan inventarisasi potensi potensi investasi 2. Melaksanakan sosialisasi kerjasama di bidang usaha

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut pada bab 3.1,Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tujuan :

1. Mewujudkan pelayanan prima
2. Mewujudkan peningkatan iklim investasi sebagai pendorong pengembangan ekonomi daerah

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan/non perizinan
2. Meningkatnya nilai investasi

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2021 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinandannon perizinan. Sasaran tersebut dicapai dengan 3 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1.1 Pelayanan Periiinan dan Non Perizinan seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

1.1.2 Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal

2. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanama modal

2.1.2. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanama modal

2.1.3. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanama modal

3. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Pengolahan, penyajian dan pemaanaan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Sasaran 2. Meningkatnya Nilai Investasi . Sasaran tersebut dicapai dengan2 program, 2 Kegiatan dan 3 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1.1.2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

2.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Penyusunan strategi promosi penanaman modal

2.1.2 Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota

Seluruh program dan kegiatan termasuk penganggarandijabarkan pada tabel TC-33 di bawah ini :

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat: DPM PTSP Kabupaten Ponorogo

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah	DPMPTSP	100%				100%	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	DPMPTSP	100%				100%	
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	DPMPTSP	2 dokumen	4.991.200	APBD II		2 dokumen	4.991.200
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja (DPA, DPPA, LKj, LPPD, laporan	DPMPTSP	5 dokumen	4.998.000	APBD II		5 dokumen	4.998.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	DPMPTSP	100%		APBD II		100%	
					Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji	DPMPTSP	30 orang	2.501.562.000	APBD II		30 orang	2.501.562.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima honor administrasi pelaksanaan tugas ASN	DPMPTSP	20 orang	70.000.000	APBD II		20 orang	70.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	DPMPTSP	100%		APBD II		100%	
					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	DPMPTSP	38 stel	38.000.000	APBD II		38 stel	38.000.000
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	DPMPTSP	38 orang	65.000.000	APBD II		38 orang	65.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran		100%		APBD II		100%	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	DPMPTSP	10 unit	5.408.400	APBD II		10 unit	5.408.400
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Mamin yang tersedia	DPMPTSP	6500 bungkus	181.315.555			6500 bungkus	181.315.555
						Jumlah Bahan pembersih dan alat kebersihan yang tersedia	DPMPTSP	4 paket		APBD II		4 paket	
						Jumlah ATK tersedia	DPMPTSP	4 paket		APBD II		4 paket	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	DPMPTSP	4 paket	17.138.000	APBD II		4 paket	17.138.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran yang tersedia	DPMPTSP	240 eksemplar	3.600.000	APBD II		240 eksemplar	3.600.000
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DPMPTSP	50 orang/kali	91.888.600	APBD II		50 orang/kali	91.888.600
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	DPMPTSP	100%		APBD II		100%	
					Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	DPMPTSP	2 unit	4.380.900	APBD II		2 unit	4.380.900
					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana yang dibeli	DPMPTSP		124.042.400	APBD II			124.042.400
					Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	DPMPTSP	100%				100%	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	DPM PTSP	450 lembar	12.998.000	APBD II		450 lembar	12.998.000
					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang	DPM PTSP	24 tagihan	72.000.000	APBD II		24 tagihan	72.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki		30 unit	30.000.000	APBD II		30 unit	30.000.000
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia	DPM PTSP	6 orang	183.284.700	APBD II		6 orang	183.284.700
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	DPM PTSP	100%				100%	
					Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	DPM PTSP	12 unit	100.000.000	APBD II		12 unit	100.000.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 unit	200.000.000	APBD II		1 unit	200.000.000
					Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana gedung kantor yang dipelihara	DPM PTSP	1 unit	1.500.000	APBD II		1 unit	1.500.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase pengembangan iklim penanaman modal	PONOROGO	100%				100%	
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	prosentase sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	PONOROGO	100%		APBD II		100%	
						Prosentase Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia		100%				100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Prosentase dokumen potensi peluang penanaman modal		100%		APBD II		100%	
		Prosentase Dokumen Perda Penanaman Modal		100%				100%	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	PONOROGO	3 dokumen	40.000.000	APBD II		3 dokumen	40.000.000
		Jumlah Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia		12 dokumen				12 dokumen	
		Jumlah dokumen potensi peluang investasi		1 dokumen		APBD II		1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal		1 dokumen				1 dokumen	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase peningkatan promosi penanaman modal	PONOROGO	100%		APBD II		100%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sarana promosi penanaman modal yang tersedia	PONOROGO	100%		APBD II		100%	
		Prosentase promosi penanaman modal yang diikuti							
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah sarana promosi penanaman modal yang tersedia	PONOROGO	1 sarana	19.000.000	APBD II		1 sarana	19.000.000
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah promosi penanaman modal yang diikuti	REGIONAL DAN NASIONAL	4 kali	41.000.000	APBD II		4 kali	41.000.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase peningkatan pelayanan penanaman modal		100%				100%	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penerbitan Izin sesuai SOP	DPM PTSP	100%		APBD II		100%	
					Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan Izin yang diverifikasi	DPM PTSP	4000 berkas	25.860.000	APBD II		4000 berkas	25.860.000
					Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah SKPD Teknis yang melaksanakan koordinasi	DPM PTSP	9 SKPD	19.937.800	APBD II		9 SKPD	19.937.800
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPM PTSP	100%				100%	
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan		100%		APBD II		100%	
						Prosentase terselesaikannya pengaduan yang masuk		100%				100%	
					Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanama modal	Jumlah laporan pemantauan terhadap pelaku usaha	PONOROGO	12 dokumen	500.000	APBD II		12 dokumen	500.000
					Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanama modal	Jumlah laporan pembinaan terhadap pelaku usaha	PONOROGO	12 dokumen	30.539.400	APBD II		12 dokumen	30.539.400

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaku Usaha	PONOROGO	12 dokumen	372.462.000	APBD II		12 dokumen	372.462.000
						Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		12 dokumen				12 dokumen	
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase peningkatan pengelolaan data informasi penanaman odal	PONOROGO	100%				100%	
					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	PONOROGO	100%		APBD II		100%	
						Prosentase ketersediaan informasi secara manual (offline) maupun online		100%				100%	
					Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan	PONOROGO	13 dokumen	20.010.600	APBD II		13 dokumen	20.010.600
						Jumlah dokumen rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan		13 dokumen				13 dokumen	
						Jumlah dokumen pengelolaan/updating informasi secara manual (offline) maupun online		60 dokumen				60 dokumen	

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab Persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ponorogo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagai instansi yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di tingkat Kabupaten Ponorogo sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam lima tahun mendatang
2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah dapat berjalan lebih baik. Dengan semangat peningkatan iklim usaha yang menjadei salah satu prioritas dalam RPJMD 2016-2021, setiap lembaga dan Pemerintah Daerah seharusnya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan Daerah.
3. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemerintah Daerah. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo di antaranya berkewajiban membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah sistem PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah.
4. Kondisi potensi dan peluang investasi di kabupaten Ponorogo sangat strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMDN ke depan. Keyakinan akan

pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan

5. Kemiskinan dan pengangguran. Adanya Laju Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, tingkat pendidikan yang rendah, besarnya Angkatan Kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang merupakan akumulasi penyebab terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Secara otomatis pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat perekonomian suatu daerah. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mendirikan industri-industri baru, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru, menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industri serta pelaksanaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, PLTU, PLTA dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual sebagai kekayaan baru organisasi dan mengantisipasi kompetensi global dengan membangun sikap kompetitif, berarti membangun SDM handal, berwawasan luas sekaligus perhatian terhadap kemajuan. Kaitannya dengan upaya mengantisipasi kompetensi, tuntutan terwujudnya SDM yang kreatif, inovatif dan mampu mendayagunakan modal intelektual tidak lepas dari perubahan lingkungan khususnya Kabupaten Ponorogo, karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar cara hidup dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan daerah
7. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan layanan perizinan/non perizinan dan investasi.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indikatif Pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PONOROGO
Matrik Rencana Kerja Tahunan
(RKT)
Tahun 2021

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)					TARGET	KET
			OUTPUT	OUTCOME			APBN	APBD I	APBD II	PART. MASY	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2:12:02	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP											
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintah daerah										
	2.18.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu										
	2.18.01.2,01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	2 dokumen				4.991.200		4.991.200		
	2.18.01.2,01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Laporan capaian kinerja (DPA, DPPA, LKj, LPPD, laporan realisasi anggaran, Laporan Keuangan,	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	5 dokumen				4.998.000		4.998.000		
	2.18.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	2.18.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	30 orang				2.501.562.000		2.501.562.000		
	2.18.01.2,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima honor administrasi pelaksanaan tugas ASN	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	20 orang				70.000.000		70.000.000		
	2.18.01.2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
	2.18.01.2,05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	38 stel				38.000.000		38.000.000		
	2.18.01.2,05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	38 orang				65.000.000		65.000.000		
	2.18.01.2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)					TARGET	KET
			OUTPUT	OUTCOME			APBN	APBD I	APBD II	PART. MASY	TOTAL		
	2.18.01.2,06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	10 unit				5.408.400		5.408.400		
	2.18.01.2,06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Mamin yang tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	6500 bungkus				181.315.555		181.315.555		
			Jumlah Bahan pembersih dan alat kebersihan yang tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	4 paket								
			Jumlah ATK tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	4 paket								
	2.18.01.2,06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumkah barang cetak dan penggandaan		4 paket				17.138.000		17.138.000		
	2.18.01.2,06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran yang tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	240 eksemplar				3.600.000		3.600.000		
	2.18.01.2,06.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah aparatur yang melakukan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	50 orang/kali				91.888.600		91.888.600		
	2.18.01.2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2.18.01.2,07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dibeli	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	2 unit				4.380.900		4.380.900		
	2.18.01.2,07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangun lainnya	Jumlah sarana prasarana yang dibeli	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik					124.042.400		124.042.400		
	2.18.01.2,08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
	2.18.01.2,08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda pos yang tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	450 lembar				12.998.000		12.998.000		
	2.18.01.2,08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon, internet, listrik yang dibayar	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	24 tagihan				72.000.000		72.000.000		
	2.18.01.2,08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	30 unit				30.000.000		30.000.000		
	2.18.01.2,08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang tersedia	Prosentase kelancaran administrasi perkantoran	6 orang				183.284.700		183.284.700		
	2.18.01.2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)					TARGET	KET
			OUTPUT	OUTCOME			APBN	APBD I	APBD II	PART. MASY	TOTAL		
	2.18.01.2,09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	12 unit				100.000.000		100.000.000		
	2.18.01.2,09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangun lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	1 unit				200.000.000		200.000.000		
	2.18.01.2,09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangun lainnya	Jumlah sarana gedung kantor yang dipelihara	Prosentase sarpras aparatur berfungsi baik	1 unit				1.500.000		1.500.000		
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											
	2.18.02.2,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											
	2.18.02.2,02.02	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	sinkronisasi data pendukung potensi penanaman modal dengan SKPD teknis	3 dokumen				40.000.000		40.000.000		
			Jumlah Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	Prosentase Dokumen sinkronisasi data penanaman modal yang tersedia	12 dokumen								
			Jumlah dokumen potensi peluang investasi	Prosentase dokumen potensi peluang penanaman modal	1 dokumen								
			Jumlah Dokumen Perda Penanaman Modal	Prosentase Dokumen Perda Penanaman Modal	1 dokumen								
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
	2.18.03.2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	2.18.03.2,01.01	Penyusunan strategi promosi penanaman modal	Jumlah sarana promosi penanaman modal yang tersedia	Prosentase sarana promosi penanaman modal yang tersedia	1 sarana				19.000.000		19.000.000		
	2.18.03.2,01.01	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah promosi penanaman modal yang diikuti	Prosentase promosi penanaman modal yang diikuti	4 kali				41.000.000		41.000.000		

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)					TARGET	KET
			OUTPUT	OUTCOME			APBN	APBD I	APBD II	PART. MASY	TOTAL		
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											
	2.18.04.2,01	Pelayanan Perinaan dan Non Perizinan seara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	2.18.04.2,01.01	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan Izin yang diverifikasi	Prosentase Penerbitan Izin sesuai SOP	4000 berkas				25.860.000		25.860.000		
	2.18.04.2,01.02	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah SKPD Teknis yang melaksanakan koordinasi	Prosentase Penerbitan Izin sesuai SOP	9 SKPD				19.937.800		19.937.800		
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
	2.18.05.2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
	2.18.05.2,01.01	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanama modal	Jumlah laporan pemantauan terhadap pelaku usaha	Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	12 dokumen				500.000		500.000		
	2.18.05.2,01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanama modal	Jumlah laporan pembinaan terhadap pelaku usaha	Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	12 dokumen				30.539.400		30.539.400		
	2.18.05.2,01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanama modal	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaku Usaha	Prosentase pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan	12 dokumen				372.462.000		372.462.000		
			Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Prosentase terselesaikannya pengaduan yang masuk	12 dokumen								
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											
	2.18.06.2,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											

NO.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR		VOLUME	LOKASI	PERKIRAAN BIAYA (Rp.)					TARGET	KET
			OUTPUT	OUTCOME			APBN	APBD I	APBD II	PART. MASY	TOTAL		
	2.18.06.2,01.01	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan	Prosentase hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	13 dokumen				20.010.600		20.010.600		
			Jumlah dokumen rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	Prosentase hasil rekonsiliasi dan sinkronisasi data perizinan dan non perizinan	13 dokumen								
			Jumlah dokumen pengelolaan/updating informasi secara manual (offline) maupun online	Prosentase ketersediaan informasi secara manual (offline) maupun online	60 dokumen								
Jumlah Dinas Penanaman Modal Dan PTSP									4.281.417.555		4.281.417.555		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo tahun 2021 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2021, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, 10 Agustus 2020

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO' at the top and 'PONOROGO' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU'. A signature is written across the stamp.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ponorogo
drh. SAPTO DJATMIKO, T.R., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670130 199202 1 002